

Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas

Yadi Supriadi ¹

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung

Abstract

The long history of journalism is in accordance with the development of the concept of public sphere. This study seeks to examine the origin of public journalism by using the concept of Jurgen Habermas about public sphere ontology, history of the press, and the relation of public sphere and the press. This research employs a literature study related to journalism and public sphere. Results show that the public concept attached to the public sphere has different definition historically. Research concludes the most suitable concept of public sphere for Indonesia nowadays. The public sphere of Habermas has two forms; political public sphere and literature public sphere. Through the two concepts of public sphere of Habermas, the researcher explains the relations between public sphere and the press and the emergence public journalism concept.

Keywords: *history of journalism, information, public journalism, public sphere*

Abstrak

Sejarah panjang jurnalisme sejalan dengan perkembangan konsep ruang publik. Penelitian ini berupaya mengkaji asal mula jurnalisme publik dengan menggunakan pandangan Jurgen Habermas mengenai ontologi ruang publik, sejarah pers, dan hubungan ruang publik dengan pers. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yang berkaitan dengan jurnalisme dan ruang publik. Hasil penelitian menunjukkan, konsep publik yang melekat pada ruang publik memiliki pengertian berbeda dalam sejarah. Pada akhirnya ditemukannya konsep ruang publik yang sejalan dengan pandangan kita saat ini. Ruang publik dalam pandangan Habermas memiliki dua bentuk; ruang publik politik dan ruang publik sastra. Melalui dua konsep ruang publik, peneliti memaparkan keterkaitan ruang publik dan pers dalam pandangan Habermas hingga munculnya

¹ **Korespondensi Penulis:**

Yadi Supriadi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung, Jawa Barat, Indonesia

supriadias71@gmail.com

konsep jurnalisme publik.

Kata Kunci: informasi, jurnalisme publik, ruang publik, sejarah jurnalisme

Pendahuluan

Istilah jurnalistik dalam bahasa Indonesia mengacu pada kata *de jour* dalam bahasa Perancis yang berarti kegiatan pencatatan sehari-hari. Pencatatan tersebut berkaitan dengan informasi-informasi yang berhubungan dengan kepentingan publik. Sementara itu menurut Junaedhi (1991:113), istilah jurnalistik dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda; *Journalistik* dan bahasa Inggris *Journalism*.

Adapun istilah lain yang sering dikaitkan dengan kegiatan jurnalistik adalah *Acta Diurna* – sebuah papan pengumuman yang berisikan tulisan-tulisan dari pemerintahan Romawi (Cangara, 1998:21). Melalui pemasangan berita pada *Acta Diurna* tersebut, rakyat Romawi dapat membaca atau melukiskan berita guna disebarluaskan untuk kepentingan publik. Pelukisan berita itu bisa dilakukan secara lisan maupun tulisan. Orang-orang yang membaca langsung *acta diurna* setara dengan reporter pada kegiatan jurnalistik masa kini. Sunarjo (1991:22) melukiskan bahwa seorang ahli sejarah Romawi yang bernama Suetonius mengatakan; pada saat penobatan Julius Caesar menjadi seorang Konsul pada tahun 59SM ia memerintahkan agar *Acta Diurna* dipasang di stadion Romawi atau Forum Romanun untuk kepentingan informasi masyarakat.

Memasuki era industrialisasi, terutama dengan ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg, kegiatan pencatatan berlangsung dalam skala lebih besar dan cepat. Buku-buku, jurnal, serta injil dicetak di Eropa. Jurnalistik kemudian memiliki wajah baru. Ia tidak hanya kegiatan yang diperlukan bagi publik, tetapi kepentingan bisnis juga muncul seiring dengan teknologi yang berkembang. Kegiatan jurnalistik kemudian dikenal dengan nama Pers. Nama ini sebenarnya merujuk pada sebuah lembaga yang memiliki kekuatan untuk mengelola informasi dan teknologi dengan modal yang kuat. Kegiatan jurnalistik yang dikelola pers bukan hanya sebagai kegiatan penyampaian informasi semata, tetapi dilengkapi dengan unsur bisnis dan persaingan antar lembaga. Oleh karena itu, membludaknya berita dan berbagi informasi menandai zaman baru di era teknologi (pos, telegrap, telepon, radio, televisi, maupun internet) saat ini.

Keberadaan pers menjadi ruang bagi publik dalam memperoleh maupun menyampaikan informasi yang penting bagi masyarakat. Dasar ontologis mengenai masyarakat pada hakikatnya dapat menjadi titik tolak dalam memahami konsep *civil society* sebagaimana yang sekarang sedang berkembang. Dalam wacana dewasa ini menurut Haryatmoko (2003:211), *civil society* mengandung dua makna; *pertama*, pengertian *civil society* yang dikaitkan dengan institusi-institusi atau organisasi, *kedua*, pengertian yang lebih merupakan seperangkat konsep yang setara dengan konsep kewarganegaraan di dalam suatu tatanan demokrasi. Pengertian kedua ini berkaitan dengan konsep masyarakat tentang kebebasan berpendapat dan berkumpul,